

NAMA MEDIA
TANGGAL
KATEGORI

: Jawa Pos
: 04 Januari 2024
: Hukum Administrasi Negara

APBN 2024, Waspadai Penurunan Harga Komoditas

Sambungan dari hal 1

Kondisi penerimaan negara pada 2024 diproyeksikan tidak akan secerah 2023. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan, proyeksi itu didasarkan pada *boom* harga komoditas yang berakhir pada 2023.

"Pendapatan negara terutama dari PNBP dan penerimaan pajak harus dicermati. Sebab, tahun 2024 ini tidak ada lagi bonanza komoditas," ujarnya kepada *Jawa Pos*, Rabu (3/1).

Bhima menjelaskan, kondisi berakhirnya *boom* harga komoditas akan membuat harga minyak mentah cenderung rendah. Hal itu juga akan berkorelasi pada pundi-pundi pendapatan negara yang berasal dari batu bara, nikel, migas, dan sektor tambang lainnya. "Sehingga *windfall profit* yang dinikmati APBN 2024 akan lebih kecil dibandingkan tahun 2023. Bahkan, PNBP-nya bisa anjlok cukup dalam," imbuhnya.

Kondisi itu, lanjut Bhima, tecermin dari kinerja ekspor

yang terus menurun. Salah satu pemicunya adalah penurunan harga komoditas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga batu bara turun 5,25 persen dan *crude palm oil* (CPO) turun 6,29 persen *year-on-year* (YoY). Penurunan ekspor batu bara sepanjang kuartal III 2023 mencapai 47,32 persen (YoY) dan ekspor CPO 27,15 persen (YoY).

Ditambah lagi, negara-negara mitra dagang RI, termasuk Tiongkok, belum mengalami pemulihan ekonomi pada 2024. Ekonomi Tiongkok juga belum membaik hingga pada level pra-pandemi. "Itu akan membawa pengaruh pada kinerja ekspor nonmigas dan migas kita," imbuh Bhima.

Pada saat yang sama, pelaku usaha juga belum bisa banyak berekspansi. Hal itu terlihat dari geliat industri manufaktur yang masih terganjal naiknya biaya impor bahan baku. Permintaan konsumen, khususnya kelompok menengah, juga belum pulih. Permintaan konsumen sedikit terganggu karena tingginya harga kebutuhan pokok seperti beras

hingga cabai rawit.

"Jadi, 2024 ini akan memengaruhi penerimaan pajak dari industri, apalagi industri manufaktur menyumbang 30 persen dari total penerimaan pajak. Ini sangat penting," jelasnya.

Pada bagian lain, pemerintah tengah menyiapkan portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan. Antara lain, *digital identity* (ID), *data interoperability*, dan *digital payment* tahun ini. Dengan integrasi itu, pemerintah bisa menghemat hampir 30 persen SDM. Artinya, bisa menghemat APBN ke depan dan tentunya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah tengah berupaya mencapai keterpaduan layanan digital nasional dengan melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas. (dee/mia/c7/oni)